

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang . Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok-kelompok ini lahir di masa pasca industrial dan dinamakan Gerakan Sosial Baru. Kelompok-kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu saja dengan harapan akan lebih efektif mempengaruhi proses pengambilan keputusan melalui direct action.

Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Hal itu juga menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki kadar keabsahan yang tinggi (legitimacy). Maka dari itu, pembatasan yang di masa lalu sering diberlakukan, seperti pembayaran pajak pemilihan (yang di Amerika Serikat pada masa itu merupakan suatu tindakan efektif untuk membatasi partisipasi orang kulit hitam), atau pemilihan hanya oleh kaum pria saja (perempuan Swiss baru mulai tahun 1972 diberi hak pilih), dewasa ini umumnya telah ditinggalkan.

Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lagipula, dikhawatirkan bahwa jika berbagai pendapat dalam masyarakat tidak dikemukakan, pemimpin negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan cenderung melayani kepentingan beberapa kelompok saja. Pada umumnya, partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah pula.

Di Indonesia, diskursus tentang partisipasi politik menjadi locus perhatian utama para pemikir politik dan cendekiawan. Politik bagi kebanyakan orang hanya semata-mata tradisi lima tahunan dalam memilih kader-kader pemimpin bangsa. Makna politik secara substantif kurang dipahami dengan benar oleh masyarakat. Akibatnya, muncul kelompok-kelompok apatisan dalam masyarakat yang enggan mengikuti hiruk-pikuk politik. Berdasarkan catatan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Pusat, tingkat golput dari tahun ketahun semakin bertambah, kendati di tahun 2014 ada sedikit kenaikan. Data menunjukkan bahwa tingkat golput pada pemilu berturut-turut sejak tahun 1999 mencapai 6,70%, 2004 (15,93%), 2009 (29,01%), dan 2014 (24,89%) .

Pengamat politik Yudi Latif berpendapat bahwa pesimisme dan apatisme politik tidak terletak pada sisi permintaan (demand side) sebagaimana kerap didalihkan oleh para politikus: rendahnya tingkat kesadaran, pragmatisme pemilih, dan minimnya tingkat pendidikan. Sumber utama melorotnya partisipasi pemilih setiap periode pemilu ialah lemahnya sisi penawaran (supply side) aktor-aktor politik yang terwujud dalam berbagai aksi penyimpangan: korupsi, kolusi, suap-menyuap, dan politik transaksional yang kian masif. Keadaan ini diperparah oleh aktifnya aktor-aktor lembaga demokrasi dalam memeras negara di suatu sisi, dan disisi lain semakin jauhnya rakyat dari cita-cita kesejahteraan dan keadilan .

Dalam berpolitik sejak dulu pemikiran rata-rata orang cenderung lebih dominan para babybomers atau para orang tua dari umur 40-an ke atas yang berpartisipasi dalam hal berpolitik tersebut. Tetapi seiring jalannya waktu di era yang lebih maju sekarang ini banyak anak muda atau kaum milenial yang berusia dari 17 tahun-ke atas yang ikut meramaikan kegiatan berpolitik khususnya Indonesia. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi, dan menjadi salah satu negara demokrasi terbesar didunia. Perkembangan demokrasi di Indonesia sejak tahun 1945 hingga saat ini banyak mengalami pasang surut. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya beberapa bentuk demokrasi di Indonesia yaitu demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan (1945-1950), demokrasi parlementer (1950-1959), demokasi terpimpin (1959-1966), demokrasi orde baru (1966-1998) dan demokrasi masa reformasi (1998-sekarang).

Posisi generasi milenial sangat diperhitungkan pada tahun politik sekarang ini. Mereka adalah bagian dari penentu kemajuan dan keberhasilan demokrasi, baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih milenial

mencapai 70 juta sampai 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Artinya, sekitar 35 sampai 40 persen memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu dan menentukan siapa pemimpin pada masa mendatang.

Generasi milenial menjadi sasaran empuk bagi politisi-politisi yang ingin mengajukan diri sebagai anggota dewan karena kondisi idealis pemuda yang mudah sekali dipengaruhi tentang keberpihakan. Dengan peran generasi milenial sebagai pemilih yang memiliki sumbangsih terhadap suara hasil pemilihan yang cukup besar, maka posisi generasi milenial menjadi sangat strategis untuk menjadi objek sasaran pemungutan suara. Pada pemilu 2014, diperkirakan ada sekitar 18,3 juta pemilih pemula dari kalangan generasi muda berusia antara 17 dan 24 tahun. Dilihat dari sisi usia, kemungkinan sebagian besar di antara mereka adalah pengguna media sosial. Mereka diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan menjadi incaran para partai politik dan politisi untuk diraih suaranya.

Memberikan suara pada pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Namun, partisipasi politik tidak semata-mata diukur berdasarkan pemberian suara pada saat pemilu. Pada dasarnya, ada banyak bentuk partisipasi politik, seperti mengirim surat (pesan kepada pejabat pemerintahan, ikut serta dalam aksi protes atau demonstrasi, menjadi anggota partai politik, menjadi anggota organisasi kemasyarakatan, mencalonkan diri untuk jabatan publik, memberikan sumbangan kepada partai atau politisi, hingga ikut serta dalam acara penggalangan dana.

Generasi muda seringkali dianggap sebagai kelompok masyarakat yang paling tidak peduli dengan persoalan politik. Mereka juga dianggap kerap mengalami putus hubungan dengan komunitasnya, tidak berminat pada proses politik dan persoalan politik, serta memiliki tingkat kepercayaan rendah pada politisi serta sinis terhadap berbagai lembaga politik dan pemerintahan.

Pandangan ini seringkali dibenarkan dengan data yang menunjukkan bahwa generasi muda yang bergabung ke dalam partai politik relatif sedikit. Mereka juga cenderung memilih menjadi golput dalam pemilu. Penelitian yang dilakukan EACEA (2013) terhadap generasi muda di tujuh negara Eropa disimpulkan bahwa generasi muda mampu mengemukakan preferensi dan minat terhadap politik. Sebagian dari mereka bahkan lebih aktif dari kebanyakan generasi yang lebih tua. Mereka juga menginginkan agar pandangan mereka lebih besar didengar. Namun, bentuk

partisipasi politik generasi muda dewasa ini cenderung menunjukkan perubahan dibandingkan dengan generasi pendahulunya. Kegiatan pemilu (pemilihan umum) bagi para wakil rakyat yang menjadi sambungan suara dan harapan seluruh rakyat Indonesia agar dapat didengar pada tingkat pemerintahan dan dapat diwujudkan demi keberlanjutan, ketentraman dan kemakmuran masyarakat.

Indonesia telah melewati konstelasi politik tahun 2019. Pesta demokrasi yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019 menandakan sebuah babak demokrasi yang mutakhir. Pemilihan serempak (Presiden, DPR, DPD, DPRD) menuntut partisipasi masyarakat, termasuk milenial dalam menentukan roda pemerintahan kita ke depan. Oleh sebab itu, masyarakat harus memilih pemimpin dan kader bangsa yang berintegritas tinggi: akhlak, moralitas, dan intelektual.

Menurut Saiful Munjani Research and Consulting (SMRC) Generasi milenial, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1990-2002 atau setidaknya 34,4% berada dalam rentang “usia emas” yaitu rentan umur 17-29 tahun. Sebagai tambahan, sekitar 10 juta milenial akan menjadi pemilih pemula atau pertama (first-time-voter) pada pemilihan umum. Milenial menjadi kelompok yang strategis karena jumlahnya mencapai 80 juta pemilih yang usianya dibawah 30 tahun.

Dalam proses pemilu pada beberapa decade sebelumnya, kaum milenial sering terpinggirkan dan bahkan tidak diperhitungkan dalam prioritas proses demokrasi sampai pada suatu titik tertentu yaitu saat ini, hal ini menjadi suatu hal yang dijunjung tinggi dan dijadikan suatu grand design penting setiap partai politik dalam menjalankan dan menghunus pedang politik ditengah “peperangan” dalam merebut suara. Kaum milenial dijadikan target utama dalam perebutan suara oleh setiap partai politik. Eksistensi kaum milenial ditengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat menggemparkan dunia politik, sebab posisi kaum milenial dipeta politik saat ini sangat diperhitungkan mengingat potensi golput pada kaum muda yang semakin meningkat disetiap tahunnya.

KPU Kabupaten Manggarai telah melaksanakan kegiatan pemilu serentak pada 17 April 2019 dengan baik dan lancar semua elemen masyarakat yang memenuhi syarat untuk melakukan pencoblosan ikut berpartisipasi dengan baik pula sehingga kegiatan tersebut telah terlaksana

sesuai dengan rencana dan harapan. Berikut ini adalah penyajian data jumlah pemilih berdasarkan umur dalam pemilu di Kabupaten Manggarai tahun 2019.

**Tabel. 1.1**  
**Data Pemilih Kelurahan Lawir Ruteng Berdasarkan Jenis Kelamin Dalam Pemilu Kabupaten Manggarai Tahun 2019 pada TPS 001-TPS 004<sup>1</sup>.**

NO	Pemilih dalam Pemilu	Jumlah peserta dalam Pemilu		Kaum Milenial	Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Jumlah Pemilih	554 orang	559 orang	322	1.103

Data diolah dari KPU Kabupaten Manggarai 2019

Dari Data Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari total 1.103 jumlah pemilih di TPS 001-TPS 004 Kelurahan Lawir. Dari total keseluruhan pemilih terdapat 322 pemilih milenial yang menggunakan hak suara pada Pemilu 2019. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi politik kaum milenial di Kelurahan Lawir sangat potensial. Atau dengan kata lain, kaum milenial ikut berpartisipasi dalam politik. Akan tetapi, pemahaman atau literasi politik kaum milenial masih lemah. Politik dipandang sebagai rutinitas lima tahunan belaka dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Oleh sebab itu, muncul kelompok-kelompok apatisan milenial yang tidak tertarik pada wacana politik. Akibatnya, muncul kelompok komunal tertentu yang turut berpartisipasi pada Pemilu 2019 kemarin hanya untuk meramaikan tempat-tempat pemungutan suara serta dipengaruhi oleh dorongan persuasif dan paksaan dari banyak pihak dengan berbagai kepentingan. Masyarakat milenial mengalami disorientasi perihal partisipasi politik, bisa dipengaruhi oleh lemahnya pemahaman dan literasi masyarakat berkaitan dengan politik.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih komprehensif dalam proposal penelitian dengan judul “Partisipasi Politik Kaum Milenial Pada Kegiatan Pemilu 17 April 2019 Di Kelurahan Lawir Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai”.

---

<sup>1</sup> KPU Kabupaten Manggarai 2019

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: Bagaimanakah partisipasi politik kaum milenial di Kelurahan Lawir Ruteng, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai dalam mengikuti Pemilu 17 April 2019?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan partisipasi politik kaum milenial di Kelurahan Lawir Ruteng, Kecamatan Langke Rembong dalam pemilu 17 April 2019.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Politik khususnya kajian mengenai partisipasi politik masyarakat dalam hal ini golongan milenial.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi tingkat partisipasi politik kaum milenial Kelurahan Lawir Ruteng, Kecamatan Langke Rembong dalam Pemilu 17 April 2019 dan dapat digunakan untuk memberi masukan kepada masyarakat khususnya kaum milenial tentang pentingnya partisipasi politik, karena suara mereka sangat penting untuk memajukan daerah bahkan negara.
- 2) Dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi para pengambilan kebijakan dalam hal ini Kelurahan Lawir Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai terkait upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya bagi anak muda.
- 3) Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi pembaca dan peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.